

KEUANGAN PUBLIK SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN EKONOMI NEGARA

Denice Alvin Giusticio Suryawardhana¹, Mia Rosmiati²
denice20001@mail.unpad.ac.id¹, m.rosmiati@unpad.ac.id²
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Keuangan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, keuangan publik mendukung penyediaan barang publik, pemerataan kesejahteraan, serta kestabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif bagaimana peran dan tantangan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan reformasi fiskal, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan pajak, distribusi anggaran yang tidak merata, serta praktik korupsi. Dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, keuangan publik dapat menjadi pendorong utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Keuangan Publik, Pembangunan Nasional, Distribusi Anggaran

PENDAHULUAN

Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah memperoleh dan membelanjakan uang untuk kepentingan masyarakat. Keuangan publik berperan sebagai alat utama bagi negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti pemerataan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas makroekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur melalui berbagai peraturan, salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan negara yang transparan, efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan publik di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak, kesenjangan distribusi anggaran antar daerah, serta inefisiensi dalam pelaksanaan anggaran masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan mekanisme keuangan publik menjadi penting sebagai landasan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan fiskal yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti buku teks ekonomi publik, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan informasi yang diperoleh secara sistematis untuk menggambarkan peran, fungsi, serta tantangan keuangan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan publik memiliki tiga peran penting dalam kegiatan ekonomi negara, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merujuk pada peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum lainnya. Karena barang-barang tersebut bersifat non-kompetitif dan non-eksklusif, maka negara

perlu campur tangan agar seluruh masyarakat dapat mengaksesnya secara adil.

Selanjutnya, fungsi distribusi berkaitan dengan bagaimana pemerintah mendistribusikan pendapatan nasional agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tajam antar kelompok masyarakat. Instrumen yang digunakan antara lain berupa subsidi, bantuan sosial, program jaminan sosial, serta pajak progresif. Tujuannya adalah agar kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

Fungsi yang ketiga adalah stabilisasi, di mana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi. Saat ekonomi mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menahan laju kenaikan harga. Sebaliknya, saat terjadi resesi, pemerintah akan meningkatkan belanja negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Instrumen utama yang digunakan dalam keuangan publik meliputi pajak, belanja negara, utang publik, dan transfer ke daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang diperoleh dari masyarakat. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan. Belanja negara mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, serta belanja pembangunan untuk membiayai proyek infrastruktur dan program sosial. Jika penerimaan pajak tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan tambahan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, dalam sistem desentralisasi fiskal seperti di Indonesia, pemerintah pusat memberikan transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal.

Namun demikian, pengelolaan keuangan publik di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Banyak wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya secara jujur, sehingga potensi penerimaan negara belum tergali secara optimal. Selain itu, distribusi anggaran yang belum merata juga menjadi masalah, di mana daerah yang kaya sumber daya cenderung mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan daerah yang miskin. Inefisiensi dalam belanja negara pun menjadi sorotan, terutama karena adanya praktik korupsi, pemborosan anggaran, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi program.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di bidang perpajakan, dilakukan modernisasi sistem administrasi melalui e-filing dan integrasi data perpajakan. Dalam pelaksanaan anggaran, diterapkan sistem e-budgeting dan e-monitoring untuk meningkatkan transparansi. Penguatan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi strategi penting untuk memastikan keuangan negara dikelola secara akuntabel.

KESIMPULAN

Keuangan publik memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dijalankan pemerintah melalui instrumen fiskal menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meski Indonesia telah memiliki landasan hukum dan sistem yang cukup memadai, tantangan dalam pengelolaan keuangan negara masih cukup besar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga pengawas perlu terus dilanjutkan agar keuangan publik dapat benar-benar menjadi alat yang efektif dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). **Public Finance in Theory and Practice**. McGraw-Hill.
- Mardiasmo. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). **Urban Public Finance in Developing Countries**. Oxford University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**.